KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Komisi X dukung revitalisasi 71 ribu sekolah, prioritaskan daerah bencana
Tanggal : Kamis, 15 Januari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Komisi X Dukung Revitalisasi 71 Ribu Sekolah

Prioritaskan Daerah Bencana

Senayan menyambut baik rencana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) merevitalisasi 71.700 sekolah selama tahun 2026. Jumlah tersebut meningkat drastis dari rencana awal sebanyak 11.700 sekolah.

WAKIL Ketua Komisi X DPR Kurniasih Mufidayati mengatakan, perluasan program perbaikan sekolah rusak pada tahun 2026 bisa dilakukan mengingat realisasi anggaran revitalisasi sekolah pada 2025 sebesar Rp 16,9 triliun berjalan baik. Perbaikan sekolah bukan lagi sekadar program tambahan, tetapi kebutuhan mendesak menjawab kondisi nyata di lapangan.

"Langkah lanjutan ini sangat penting karena kondisi infrastruktur pendidikan dasar dan menengah masih menghadapi tantangan serius. Khususnya pada kualitas ruang kelas sebagai tempat utama proses belajar-mengajar," ujar Kurniasih dalam keterangannya, Rabu (14/1/2026).

Diketahui, Kemendikdasmen memenuhi permintaan Presiden Prabowo Subianto untuk menambah target penerima manfaat program revitalisasi sebanyak 60 ribu sekolah pada tahun 2026. Sedangkan target awal adalah 11.700 sekolah. Artinya, kini program revitalisasi sekolah meningkat drastis menjadi 71.700.

Berdasarkan data Kemendikdasmen, pada tahun ajaran 2024/2025 terdapat 1,18 juta ruang kelas SD di Indonesia. Sayangnya sebanyak 60,3 persen di antaranya berada dalam kondisi rusak. Rinciannya 27,22 persen rusak ringan, 22,27 persen rusak sedang, dan 10,81 persen rusak berat. Sedangkan ruang kelas SD yang berada dalam kondisi baik hanya 39,7 persen.

Kemudian, di jenjang SMP, dari 421 ribu ruang kelas, hanya 50,33 persen dalam kondisi baik. Sisanya 24,73 persen rusak ringan, 17,96 persen rusak sedang, dan 6,97 persen rusak berat.

Berdasarkan temuan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam tiga tahun terakhir, yakni periode 2022 hingga 2024, jumlah ruang kelas rusak di jenjang SD, SMP, dan SMA justru terus meningkat. Sedangkan jumlah ruang kelas dalam kondisi baik mengalami penurunan.

"Data ini menunjukkan pembangunan pendidikan tidak cukup hanya menambah jumlah ruang kelas. Justru yang jauh lebih mendesak adalah memastikan ruang belajar yang sudah ada benar-benar layak, aman, dan mendukung proses pembelajaran," sambung politisi PKS itu.

Selain itu, ia menekankan pentingnya penentuan prioritas perbaikan sekolah, khususnya di daerah rawan dan terdampak bencana seperti banjir dan longsor. Sebab sekolah di wilayah tersebut sering kali mengalami kerusakan berulang. Sehingga memerlukan perhatian dan intervensi yang lebih cepat serta komprehensif. "Daerah bencana harus menjadi prioritas," tandasnya.

FOTO IG PRIBADI

Kurniasih Mufidayati

Dia mengingatkan, anak-anak di wilayah yang terdampak banjir, longsor, atau bencana alam tidak boleh kehilangan hak atas pendidikan yang layak. Apalagi hanya karena gedung sekolahnya rusak dan tak kunjung diperbaiki.

Kurniasih menekankan program revitalisasi bangunan sekolah tidak hanya berorientasi pada jumlah, tetapi juga pada kualitas bangunan agar lebih tahan lama. Awasi perencanaan teknis, spesifikasi material, serta pemilihan kontraktor. Tujuannya, agar hasil pembangunan tidak cepat rusak dan tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari.

Dia menambahkan, revitalisasi sekolah harus menghasilkan bangunan yang kokoh, aman, dan berumur panjang. Karena itu, kualitas pekerjaan dan integritas pelaksana proyek menjadi faktor yang sangat krusial.

Perbaikan gedung sekolah merupakan bagian dari upaya pemerataan akses pendidikan berkualitas. Hal ini sejalan dengan komitmen pembangunan nasional dalam Asta Cita. "Kualitas sarana dan prasarana pendidikan merupakan fondasi penting untuk mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antarwilayah," kata dia.

Komisi X DPR, lanjutnya, mendorong agar program perbaikan sekolah dirancang secara lebih menyeluruh dan berkelanjutan dan tidak bersifat tambal sulam. Tentunya dengan memperhatikan aspek keselamatan, kenyamanan, inklusivitas, dan ketahanan terhadap bencana maupun perubahan iklim.

Anggota Komisi X DPR Habib Syarief Muhammad menambahkan, kebijakan revitalisasi sekolah sangat tepat dan menjawab kebutuhan nyata di lapangan. Hingga saat ini masih banyak gedung sekolah di berbagai daerah yang mengalami kerusakan dan berada dalam kondisi tidak layak untuk menunjang proses belajar mengajar.

Penambahan jumlah sekolah yang direvitalisasi ini kata Habib merupakan langkah strategis dan sangat dibutuhkan. "Kita tidak bisa menutup mata masih banyak sekolah dengan kondisi bangunan yang rusak, bahkan membahayakan keselamatan siswa dan guru," ujarnya, kemarin.

Habib menegaskan, sarana dan prasarana pendidikan merupakan faktor fundamental dalam menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan berkualitas. Karena lingkungan sekolah yang aman dan layak akan berdampak langsung pada kenyamanan belajar siswa serta kinerja tenaga pendidik.

"Pendidikan tidak hanya soal kurikulum dan tenaga pengajar, tetapi juga soal fasilitas. Jadi gedung sekolah yang layak adalah prasyarat utama untuk mencetak generasi yang unggul," tegas politikus PKB ini.

Habib menilai kebijakan Presiden Prabowo dengan menambahkan jumlah revitalisasi sekolah sebagai bukti nyata kepedulian dan komitmen Pemerintah terhadap kemajuan dunia pendidikan nasional. Diharapkan pelaksanaan program revitalisasi ini dapat dilakukan secara tepat sasaran, transparan, dan merata. Utamanya bagi sekolah-sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

"Kami akan terus mengawal kebijakan ini agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas dan menjadi investasi jangka panjang bagi masa depan pendidikan Indonesia," harap legislator asal Jawa Barat (Jabar) ini.

Sementara, Mendikdasmen Abdul Mu'ti mengatakan, prioritas program revitalisasi satuan pendidikan di 2026 adalah sekolah yang rusak. Nantinya, sekolah yang hanya memerlukan perbaikan kecil bisa menggunakan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan tidak perlu dari anggaran revitalisasi. ■ TIF